

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam prespektif teori planned behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28.
- Annisya, F. (2018). "Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Langan Kecamatan Gunung Meriah.". *Muhamadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Evan Stiawan, A. S. (2021). Bahan ajar manajemen keuangan: Konsep Laporan Keuangan dan Obligasi. *CV. SINAR JAYA BERSERI*.
- Goran, A. W. (2020). Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Sebagai Determinasi Bagi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Cibeunying, Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Hidayatulloh, A. &. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 29-32.
- Keuangan., M. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182.
- Muamarah, H. S. (2019). Pemajakan dana desa Abstraksi. 95-103.
- Nasution, H. &. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 129-142.
- Nataherwin. (2017). Kupas Tuntas tentang PPN dan PPnBM. Rasibook.
- Nurjidah. (2017). Pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa dan tantangan dalam pelaksanaannya (Studi Desa di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa) Skripsi.

Pemendagri. (2014). no.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 Pemendagri. (2014c). No 113 tentang pertanggungjawaban Bendahara Desa.

Pemerintah, R. I. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Peraturan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, Ayat 1 tentang Pajak dan Kontribusi wajib pajak. (t.thn.).

Permendagri, P. (2018). Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

PMK No.99. (2018). tentang pemungutan PPh 22 kepada Wajib Pajak. (t.thn.).

PMK Nomor 101/PMK.01. (2016). Tentang Penyesuaian Besarnya. (t.thn.).

Raharjo., M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.

Rohmadi., M. (2015). Dasar-dasar pene;litian sastra dan pengajaran.

Saprudin., K. S. (2022). "Penerapan perpajakan pada dana desa di desa anjir serapat tengah kabupaten Kapuas Kalimantan tengah.". *Reputasi (Referensi perpajakan dan Ulasan Akuntansi)*, vol 3 Nomor 1.

Sunardi, N. &. (2020). pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera mandiri di desa cihambulu kecamatan pabuaran kabupaten subang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi peraturan perpajakan. (t.thn.).

Wahyu, s. (2019). pelaksanaan perpajakan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa bungaejaya kecamatan pallangga kabupaten gowa).

Wicaksono, G. (2018). Aspek Perpajakan yang Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa.

<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>.